

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita permasalahan kebaangsaan yang berkembang saat ini, diantaranya disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila, minimnya kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila, bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, ancaman disintegrasi bangsa, dan melemahnya kemandirian bangsa. Untuk itu diperlukan pembangunan karakterwarga negara, agar negara Indonesia menjadi tangguh.

Karakter merupakan ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, dan merupakan mesin yang mendorong bagaimana seseorang individu bertindak, bersikap, dan merespon sesuatu. Ciri ini pula yang diingat oleh orang lain tentang orang tersebut, sekaligus menentukan suka atau tidak sukanya mereka terhadap individu tersebut. Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya (Samani dan Haryanto, 2011:41).

Karakter merupakan suatu hal yang penting, karena karakter berkaitan erat dengan kehidupan seseorang dalam bermasyarakat. Karakter yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya tidak pernah lepas dari proses pembelajaran dan proses pembentukan diri manusia itu sendiri. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. Karakter yang dikembangkan oleh pemerintah meliputi karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/ komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab (Syafri, 2012:xi-xiii). Dari sekian banyak karakter yang ada pada setiap orang salah satu karakter yang harus dimiliki oleh individu warga negara adalah karakter jujur.

Karakter jujur atau kejujuran merupakan kesesuaian antara ucapan dengan kenyataan atau antara keadaan yang terlihat dengan keadaan yang tersembunyi. Jika seseorang mengucapkan perkataan sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya dan dibuktikan dengan perbuatannya, maka orang tersebut dikatakan memiliki karakter jujur. Orang yang bersikap sesuai dengan keyakinan yang terdapat dalam hatinya juga disebut orang jujur. Inilah pengertian karakter jujur secara umum. Kejujuran membuat integritas dalam hidup, karena apa yang ada di dalam dan di luar diri adalah cermin jiwa. Jujur berarti lurus hati, tidak berbohong misalnya dalam perkataan berkata apa adanya, tidak curang (dalam permainan atau ujian), dan senantiasa mengikuti peraturan yang berlaku (Elfindri, 2012:96). Jujur juga

dapat diartikan sebagai sebuah nilai merupakan keputusan seseorang untuk mengungkapkan (dalam bentuk perasaan, kata-kata dan/atau perbuatan) bahwa realitas yang ada tidak dimanipulasi dengan cara berbohong atau menipu orang lain untuk keuntungan dirinya (Kesuma dkk, 2011:16-17).

Karakter jujur harus dimiliki oleh semua masyarakat, baik masyarakat dari golongan orang kaya, berkecukupan, dan miskin hendaknya selalu berperilaku jujur. Kejujuran akan memberikan ketenangan di dalam hati dan pikiran dan sebaliknya ketidakjujuran akan menimbulkan tekanan di dalam hati, biasanya suatu ketidakjujuran akan diikuti oleh ketidakjujuran lainnya. Karakter jujur pada masyarakat bukan hanya dalam perkataan semata, melainkan dalam perilaku dan tindakan. Salah satu bentuk karakter kejujuran pada masyarakat yaitu tidak berbohong, tidak curang, mengungkapkan apa adanya, tidak memanipulasi keadaan dan sebagainya. Namun yang ada cukup sulit menemukan orang jujur sekarang ini. Beban kehidupan mendorong orang untuk memilih dusta daripada jujur. Dengan berdusta bisa mempermudah jalan untuk mendapatkan berbagai keinginan dan tujuan. Sebaliknya, orang menganggap kejujuran sebagai kerugian yang sering berujung pada kegagalan. Seperti dilansir *Sidonews.com*, praktik perjokian mewarnai tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Sebanyak enam orang yang diduga sebagai joki dalam ujian penerimaan CPNS Kementerian dan HAM di Provinsi Sulawesi Selatan pelakunya berhasil diamankan oleh aparat kepolisian. Polrestabes Makassar akhirnya menetapkan keenam joki tersebut sebagai tersangka. Keenam orang tersangka tersebut adalah

Zulkaidah Nur Ahzan, Amri Usman, Muhi, Andi Rahma Marsuki, Anugerah, dan Rifka Awalya. Para joki tersebut mengaku terpaksa menjadi joki setelah diiming-imingi mendapatkan Rp20.000.000,00 hingga Rp40.000.000,00 jika peserta CPNS yang digantikannya dinyatakan lulus. Kasus tersebut tentu menjadi bukti bahwa masih banyak orang yang tidak jujur. Fenomena yang terjadi terkait masalah ketidakkejujuran tentu menimbulkan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan realita yang ada. Adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa terjadi terkait masalah kejujuran pada masyarakat umum sangat menarik untuk diteliti, khususnya kejujuran pada masyarakat penerima bantuan langsung tunai.

Kejujuran pada masyarakat penerima bantuan langsung tunai merupakan hal yang penting. Idealnya orang yang menerima bantuan langsung sementara masyarakat adalah orang benar-benar dikategorikan miskin dan harus memenuhi sembilan dari 14 kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah. Adapun 14 kriteria yang harus dimiliki untuk dapat memperoleh bantuan langsung sementara masyarakat yaitu: 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi untuk masing-masing anggota keluarga, 2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu berkualitas rendah, 3. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, 4. Fasilitas jamban tidak ada, atau ada tetapi dimiliki secara bersama-sama dengan keluarga lain, 5. Sumber air untuk minum/memasak berasal dari sumur/mata air tak terlindung, air sungai, danau, atau air hujan, 6. Sumber penerangan di rumah bukan listrik, 7. Bahan bakar yang digunakan memasak berasal dari kayu bakar,

arang, atau minyak tanah, 8. Dalam seminggu tidak pernah mengonsumsi daging, susu, atau hanya sekali dalam seminggu, 9. Dalam setahun paling tidak hanya mampu membeli pakaian baru satu stel, 10. Makan dalam sehari hanya satu kali atau dua kali, 11. Tidak mampu membayar anggota keluarga berobat ke puskesmas atau poliklinik, 12. Pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan setengah hektare, buruh tani, kuli bangunan, tukang batu, tukang becak, pemulung, atau pekerja informal lainnya dengan pendapatan maksimal Rp600.000,00 setiap bulan, 13. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga bersangkutan tidak lebih dari SD, 14. Tidak memiliki harta dengan nilai Rp500.000,00 seperti misalnya tabungan, perhiasan emas, TV berwarna, ternak, sepeda motor (kredit atau nonkredit), kapal motor, tanah, atau barang modal lainnya (Widodo, 2010).

Kriteria di atas seharusnya dipenuhi oleh seseorang untuk menerima bantuan langsung. Namun realitanya ada indikasi penerima bantuan langsung yang tidak memenuhi kriteria tersebut, atau ketika mereka mengajukan persyaratan untuk mendapatkan bantuan berlaku tidak jujur. Tidak sedikit para penerima bantuan langsung tunai yang dikategorikan berkecukupan, tetapi mendapat bantuan tersebut. Seperti dilansir *Sidonews*, bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di kabupaten Jombang, Jawa Timur belum tepat sasaran karena warga yang berkecukupan justru mendapat BLSM, sebaliknya masyarakat miskin tidak mendapatkan kompensasi tersebut. Pada saat pembagian BLSM tampak sejumlah warga mengenakan perhiasan lengkap seperti kalung, dan gelang emas. Bahkan tak sedikit diantaranya yang datang dengan

mengendarai sepeda motor. Kenyataan tersebut jelas menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Penerima bantuan langsung semestinya berkarakter jujur mengenai dirinya, sehingga mereka yang berkecukupan seharusnya tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Kesenjangan mengenai apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi terkait kejujuran pada masyarakat penerima bantuan langsung sementara masyarakat menarik untuk diteliti karena relevan dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran yang membina perkembangan moral anak didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agar dapat mencapai perkembangan secara optimal dan dapat mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari (Daryono dkk. 2011:1). PPKn merupakan wadah dalam membentuk karakter bangsa termasuk karakter kejujuran. Selain itu penelitian mengenai karakter kejujuran juga terkait dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Relevansi tersebut dapat dilihat dari visi, misi, maupun tujuannya. Visi Program Studi PPKn FKIP UMS di yaitu menjadi pusat pengembangan pendidikan dan pembelajaran bidang PPKn dan serta Ketatanegaraan untuk membentuk bangsa yang berkarakter kuat dan memiliki kesadaran berkonstitusi menuju masyarakat madani (Buku Panduan FKIP, 2013:138). Visi tersebut selanjutnya dirumuskan dalam misi PPKn FKIP UMS sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Ketatanegaraan.
2. Memajukan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta meningkatkan sumber daya manusia yang berkarakter kuat sehingga mampu

memecahkan permasalahan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan menuju masyarakat madani.

3. Menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan generasi muda melalui program Pendidikan Kepramukaan (Buku Panduan FKIP, 2013:138).

Sedangkan tujuan dari PPKn FKIP UMS yaitu:

1. Menghasilkan guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Ketatanegaraan yang profesional, mampu mengembangkan pembelajaran inovatif dan melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas.
2. Menghasilkan guru yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk mendukung profesionalisme guru.
3. Menghasilkan guru berkarakter kuat dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasional.
4. Menghasilkan guru yang memiliki kemampuan dalam membina generasi muda melalui Pendidikan Kepramukaan (Buku Panduan FKIP, 2013:138).

Pada dasarnya PPKn bertujuan untuk membentuk moral bangsa sehingga memiliki karakter yang kuat. Kedudukan peneliti adalah sebagai mahasiswa PPKn FKIP UMS sehingga peneliti memiliki kewajiban berpartisipasi untuk membentuk karakter bangsa yang kuat sebagaimana tertuang pada visi, misi, dan tujuan program studi PPKn FKIP UMS tersebut. Fokus penelitian ini adalah mengenai karakter khususnya karakter jujur/ kejujuran, sehingga relevan dengan kedudukan peneliti sebagai mahasiswa program studi PPKn FKIP UMS.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Karakter Kejujuran (Studi Kasus pada Penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah profil penerima bantuan langsung sementara masyarakat di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimanakah implementasi karakter kejujuran pada penerima bantuan langsung sementara masyarakat di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?
3. Bagaimanakah kendala implementasi karakter kejujuran pada penerima bantuan langsung sementara masyarakat di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan profil masyarakat penerima bantuan langsung sementara masyarakat di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi karakter kejujuran pada penerima bantuan langsung sementara masyarakat di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

3. Untuk mendeskripsikan kendala implementasi karakter kejujuran pada penerima bantuan langsung sementara masyarakat di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai karakter kejujuran pada masyarakat penerima bantuan langsung sementara masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikut yang sejenis.

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis

- a. Pemerintah.
 - 1) Sebagai evaluasi dalam memberikan bantuan langsung, sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran.
 - 2) Agar lebih selektif dalam menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan langsung.
 - 3) Melaksanakan kebijakan secara profesional sesuai dengan ketentuan yang dijadikan dasar.
- b. Masyarakat.
 - 1) Mengawasi program pemerintah, agar sesuai dengan ketentuan sehingga tepat sasaran.

- 2) Menyatakan yang sebenarnya apabila masyarakat penerima bantuan langsung tersebut tidak termasuk dalam kategori miskin.
- 3) Tidak memanipulasi keadaan untuk kepentingan diri sendiri, sekaligus merugikan orang lain.

E. Daftar Istilah

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, peneliti perlu mencantumkan daftar istilah dari skripsi ini. Adapun daftar istilah skripsi ini sebagaimana uraian berikut.

1. *Karakter*, dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya (Samani dan Haryanto, 2011:41). Selain itu, karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan ciri atau karakteristik atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan (Koesoema dalam Hamid dan Saebani, 2013:31). Jadi karakter merupakan ciri atau sifat yang khas tiap individu yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan dan membedakan dengan individu lain.
2. *Kejujuran*. Jujur sebagai sebuah nilai merupakan keputusan seseorang untuk mengungkapkan (dalam bentuk perasaan, kata-kata dan/atau perbuatan) bahwa realitas yang ada tidak dimanipulasi dengan cara berbohong atau menipu

orang lain untuk keuntungan dirinya (Kesuma dkk, 2011:16-17). Jujur juga merupakan perilaku yang ditandai dengan menyatakan apa adanya, konsisten antara apa yang dikatakan dan dilakukan, berani karena benar, dapat dipercaya, dan tidak curang (Samani dan Hariyanto, 2011:51). Jadi jujur merupakan perilaku yang ditandai dengan menyatakan apa adanya, berkata benar dan menipu orang lain untuk keuntungan dirinya. Dengan demikian kejujuran merupakan perilaku yang menyatakan kebenaran, tidak berbohong dan tidak memanipulasi keadaan untuk kepentingan dirinya.

3. *Masyarakat*, merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas (Linton dalam Soekanto, 2006:22). Selain itu masyarakat juga merupakan orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Jadi, masyarakat merupakan sekelompok orang yang telah hidup bersama cukup lama dan menghasilkan kebudayaan.
4. *Kemiskinan*, diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2007:320). Keimiskinan juga didefinisikan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya (BAPPENAS dalam Badrudin, 2009). Jadi kemiskinan merupakan suatu keadaan yang tidak dapat dihindari seseorang dalam situasi

serba kekurangan dan tidak mampu memanfaatkan mental maupun fisik dalam kelompok tersebut.

5. *Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)*, merupakan bantuan tunai langsung sementara untuk membantu mempertahankan daya beli Rumah Tangga miskin dan rentan agar terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). BLSM disalurkan untuk membantu Rumah Tangga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan hidup Rumah Tangga, pembelian obat-obatan kesehatan, biaya pendidikan dan keperluan-keperluan lainnya (Tim Sosialisasi Penyesuaian Bahan Bakar Minyak, 2013:28). BLSM merupakan program bantuan tunai yang serupa dengan program yang sudah dilaksanakan pada kenaikan harga BBM sebelumnya, yaitu Subsidi Langsung Tunai (SLT) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2005/2006 dan BLT 2008/2009. BLSM bertujuan membantu mempertahankan daya beli rumah miskin dan rentan dari dampak kenaikan harga berbagai komoditas akibat penyesuaian harga BBM (Hastuti dkk, 2013:1). Dengan demikian BLSM merupakan bantuan langsung berupa uang tunai yang dilaksanakan membantu mempertahankan daya beli Rumah Tangga miskin dan rentan agar terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat penyesuaian harga BBM